

## ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang akibatnya dapat dirasakan sangat luas, tidak hanya bagi individunya dan masyarakat, bahkan melemahkan ketahanan Nasional. Pidanaan dalam putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh hakim terjadi keberagaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, mengapa terjadi disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati dan implementasi tujuan pidanaan dengan dasar terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati. Metode pendekatan yang digunakan adalah *juridis sosiologis*, menggunakan data primer dari wawancara dengan pihak-pihak terkait dihubungkan dengan data sekunder dari bahan-bahan hukum atau peraturan yang berlaku. Hasil penelitian : 1) Majelis hakim di Pengadilan Negeri Pati dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasar ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) , dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang dari tiga tahun terakhir pidanaan selalu terdapat disparitas pidana. 2) disparitas pidana adalah konsekuensi dari faktor internal dan eksternal dari suatu perkara yaitu dampak tindak pidana penyalahgunaan narkotika, latar belakang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, perilaku terdakwa di persidangan, barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, surat dakwaan dan tuntutan pidana, pribadi hakim, hukum, asas *the persuasive of presedent*, eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945, Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang ada, teori *dissenting opinion*, dan *doktrin res judicate pro veritate hebetur*. 3) Implementasi tujuan pidanaan dalam disparitas pidana perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terdapat dalam perumusan minimal khusus pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, merupakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan mengefektifkan pengaruh prevensi umum. pidanaan dijatuhkan, merupakan upaya terakhir hukum pidana yang bermakna sebagai pencegahan khusus, pencegahan terhadap pelakunya untuk mendapatkan penjeratan dan melakukan rehabilitasi bagi dirinya.

Kata kunci : *Penyalahgunaan Narkotika, Disparitas Pidana, Tujuan Pidanaan*

## ABSTRAC

Narcotics abuse is a criminal act whose consequences can be felt very broadly, not only for individuals and society, but even weaken National security. Criminalization in the case of criminal acts of narcotics abuse by the judge is varied. The purpose of this study was to find out and analyze how the judges' decisions against perpetrators of narcotics abuse in the legal area of Pati District Court, why there was a criminal disparity in the judges' decision on criminal cases of narcotics abuse in the Pati District Court and the implementation of the criminal offense. criminal disparity in the judge's ruling on narcotics abuse cases in the jurisdiction of the Pati District Court. The method of approach used is juridical sociology, using primary data from interviews with related parties associated with secondary data from legal or regulatory materials. The results of the study: 1) The panel of judges in the Pati District Court in imposing criminal cases on narcotics abuse cases based on the provisions of the article 112 paragraph (1) and paragraph (2), Article 114 paragraph (1) and paragraph (2), and Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009, which from the past three years there has always been criminal disparity. 2) criminal disparity is a consequence of internal and external factors, namely the impact of criminal acts of narcotics abuse, background of criminal acts of narcotics abuse, behavior of defendants in court, evidence of criminal acts of narcotics abuse, indictments and criminal charges, personal judges, law, the principle of the persuasive presedent, the existence of the freedom and independence of judges in the 1945 Republic of Indonesia Constitution, existing judicial power laws, the theory of dissenting opinions, and the doctrine of the judicate pro veritate hebetur res. 3) Implementation of the purpose of punishment in the criminal disparity of criminal acts of narcotics abuse, contained in the minimum formulation of special crimes in Law Number 35 of 2009, is to fulfill the demands of the community and make the effect of general prevention effective. conviction is imposed, is the last attempt of criminal law which is meaningful as a special prevention, prevention of perpetrators to get deterrence and rehabilitate themselves.

Keywords: *Narcotics Abuse, Criminal Disparity, Purpose of Penalty*